

LAPORAN KINERJA 2026



SPPMHKP BAUBAU TW.II



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2026 Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2026 Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau (Stasiun PPMHKP Baubau) ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian Isi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2026 Stasiun PPMHKP Baubau adalah Target Kinerja Stasiun PPMHKP Baubau Tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Stasiun PPMHKP Baubau Tahun 2026 beserta realisasinya.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Stasiun PPMHKP Baubau di masa mendatang.



Baubau, 14 Juli 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Baubau


ARROFIK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
2 PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 VISI DAN MISI	5
2.2 SASARAN KINERJA	5
3 AKUNTABILITAS KINERJA	8
3.1 CAPAIAN KINERJA	8
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	10
3.3 REALISASI ANGGARAN	27
3.4 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA	28
4. PENUTUP	29
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tugas dan Fungsi BPPMHKP	2
Gambar 2. Struktur Organisasi BPPMHKP	2
Gambar 3. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Baubau 2026	4
Gambar 4. Visi, Misi dan Tujuan BPPMHKP	5
Gambar 5. Tangkapan Layar <i>ekinerjaku.kkp.go.id</i>	8

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Baubau Tahun 2026	6
Tabel 2.	Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Baubau Triwulan II Tahun 2026	9
Tabel 3.	Capaian IK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	11
Tabel 4.	Capaian Kegiatan Sertifikat CPIB Kapal	12
Tabel 5.	Capaian Kegiatan Sertifikat CBIB	12
Tabel 6.	Capaian IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau	13
Tabel 7.	Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau	16
Tabel 8.	Capaian IK 4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Baubau	18
Tabel 9.	Capaian IK 5. Nilai Pembangunan Integritas lingkup UPT Stasiun PPMHKP Baubau	19
Tabel 10.	Capaian IK 6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Baubau	20
Tabel 11.	Capaian IK 7. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau	21
Tabel 12.	Capaian IK 8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau	22
Tabel 13.	Capaian IK 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau	24

Tabel 14. Capaian IK 10. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau	25
Tabel 15. Capaian IK 11. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Baubau	26
Tabel 16. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja untuk Stasiun PPMHKP Baubau Triwulan IITahun 2026	27

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Baubau
- Lampiran 2. Rincian Target Indikator Kinerja
- Lampiran 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Kegiatan Stasiun PPMHKP Baubau Triwulan II Tahun 2026
- Lampiran 4. Tangkapan Layar Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aplikasi SIDAK KKP
- Lampiran 5. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2026
- Lampiran 6. Capaian Setifikasi CPIB Kapal
- Lampiran 7. Capaian Sertifikasi CBIB
- Lampiran 8. Persentase Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Stasiun PPMHKP) Baubau Triwulan II Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun PPMHKP Baubau pada Triwulan II Tahun 2026. Stasiun PPMHKP Baubau telah menetapkan target kinerja tahun 2026 dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Stasiun PPMHKP Baubau dengan Kepala BPPMHKP yang sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target kinerja Stasiun PPMHKP Baubau Tahun 2026 terdiri dari 3 Sasaran Strategis (SS) dan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara garis IKU Stasiun PPMHKP Baubau Tahun 2026 terdiri dari : 1). Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (target 72%); 2). Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (target 72%); 3). Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (target 72%); 4). Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (target 82,5); 5). Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (target 77); 6). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (target 86,2); 7). Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (target 86%); 8). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (target 92,1); 9). Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (target 71,75); 10). Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (target 77%); 11). Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (target 89).

Beberapa IKU pada Triwulan II2026 ini yang sudah ada progres capaiannya yaitu terdapat 5 IKU, antara lain :

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau target 72%, realisasi 75,40% dengan nilai persentase 104,72%
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau target 72%, realisasi 68,32% dengan nilai persentase 94,44%
3. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau target 82,5 Realisasi 81,66% atau dengan nilai persentase 98,98%
4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Baubau target 86% realisasi 100% atau 116,3%.
5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau target 82% realisasi 99,62% atau 121,48%
6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau target 77%, realisasi 100% atau 129,8%.
7. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau target 89%, realisasi 95,52 atau 107,3%

REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Baubau Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp. 3.981.620.000,-** (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dengan rincian Jenis Belanja sebagai berikut : **Belanja Pegawai** sebesar **Rp 3.493.361.000,-** (*Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*), **Belanja Barang** sebesar **Rp 488.259.000,-** (*Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), **Belanja Modal = 0**. Pada Triwulan II terdapat pengalihan anggaran belanja ke Rincian Output Khusus sebesar **Rp. 327.617.000,-**

tahun 2026 pagu awal semula **Rp 4.350.758.000,-** menjadi **Rp 3.981.620.000,-**. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Baubau sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan Jenis Belanja yaitu untuk Belanja Pegawai terealisasi **Rp 1.369.047.831,-** atau sebesar **39.19%** dan Belanja Barang terealisasi **Rp 208.189.396,-** atau sebesar **42,64%** sedangkan untuk Belanja Modal tidak ada pagu anggaran yang ditetapkan. Total realisasi anggaran untuk Triwulan II adalah **Rp 1.577.237.227,-** atau sebesar **39.61%**. Pagu anggaran tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Manajemen Mutu dan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Stasiun Ikan, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Stasiun PPMHKP Baubau) merupakan kepanjangan tangan dari BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PPMHKP Baubau dituntut untuk melaksanakan secara, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja Triwulan IITahun 2026 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun PPMHKP Baubau dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Baubau. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai Eselon I dari UPT Stasiun PPMHKP Baubau adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Tugas dan Fungsi BPPMHKP

Sedangkan Struktur Organisasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi BPPMHKP

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun PPMHKP Baubau mempunyai tugas pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan mutu hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PPMHKP Baubau menyelenggarakan fungsi :

- a) pelaksanaan pengujian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- b) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan
- c) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- d) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- e) pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- f) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Baubau, Kepala Stasiun dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Total jumlah seluruh pegawai sebanyak 24 orang dengan rincian 20 orang ASN (9 orang PNS dan 11 orang PPPK), 1 orang PPPK Paruh Waktu dan 3 orang PJLP. Data rincian pegawai ASN berdasarkan jabatannya adalah sebagai berikut :

1. Kepala : 1 orang
2. Fungsional Inspektur Mutu : 6 orang
3. Fungsional APK APBN : 1 orang
4. Penelaah Teknis Kebijakan : 1 orang
5. Fungsional Asisten Inspektur Mutu : 1 orang
6. Penata Layanan Operasional : 6 orang
7. Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan : 1 orang

- 8. Pengadministrasi Perkantoran : 2 orang
- 9. Operator Layanan Operasional : 1 orang
- 10. PPPK Paruh Waktu : 1 orang
- 11. PJLP : 3 orang

STRUKTUR ORGANISASI STASIUN PPMHKP BAUBAU TAHUN 2026

KEPALA



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 3. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Baubau 2026

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Visi dan misi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Visi, Misi dan Tujuan BPPMHKP

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP adalah mengendalikan dan mengawasi mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk menjamin mutu hasil perikanan nasional.

2.2. SASARAN KINERJA

Untuk mendukung tercapainya tujuan BPPMHKP, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP, Stasiun PPMHKP Baubau menetapkan Sasaran Kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Baubau seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Baubau Tahun 2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU				
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
SK 1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	72	
	2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	72	
SK 2 Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Diletakkan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	72	
SK 3 Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Baubau	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)	82,5	
	5.	Nilai Pembangunan Zona Integritas lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	77	
	6.	Nilai penilaian mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	86,2	
	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Persen)	86	
	8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	92,1	
	9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	71,75	
	10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	77	
	11.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	89	

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.927.808.000
2.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	53.812.000
Total Anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau Tahun 2026		3.981.620.000

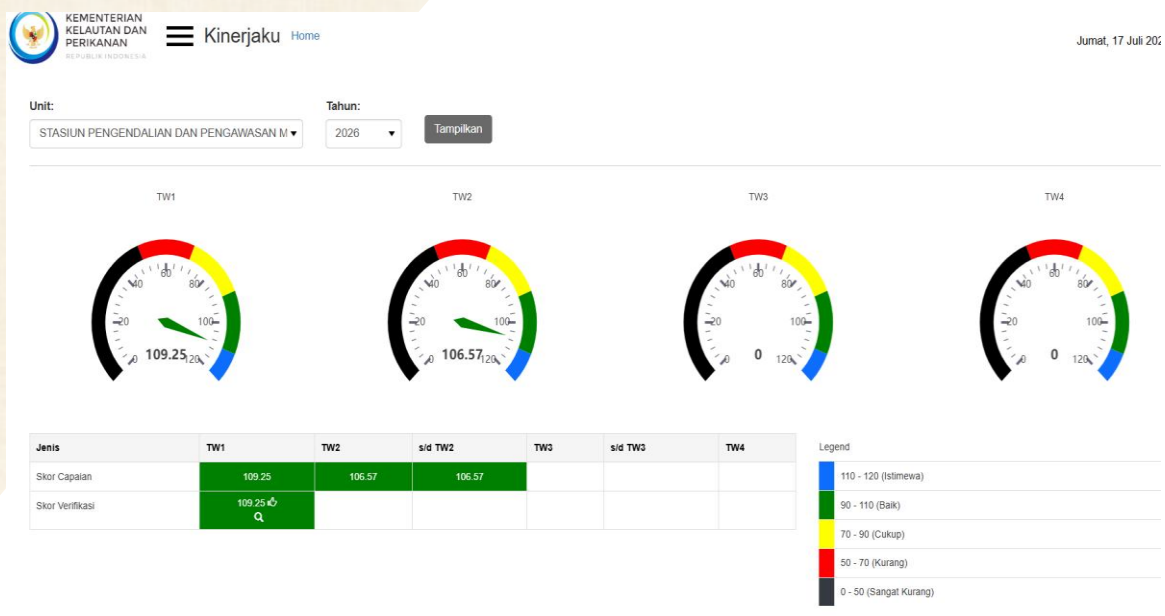
Rencana Kerja dan Anggaran Stasiun PPMHKP Baubau Tahun 2026 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Baubau Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 3.981.620.000,- (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dengan rincian kegiatan :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan sebesar Rp 53.812.000,- (*Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*)
2. Dukungan Manajemen Internal lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Rp 3.927.808.000,- (*Tiga Milya Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah*)

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

3.2. Capaian kinerja Stasiun PPMHKP Baubau Triwulan II 2026 sudah sangat baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang mendapatkan nilai sebesar **106,57** berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id yang menggambarkan kinerja organisasi. Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pelaporan capaian indikator kinerja Triwulan II yang telah dilaksanakan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2026.



Gambar 5. Tangkapan Layar dari ekinerjaku.kkp.go.id

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat capaian Nilai NPSS dan kategorinya dimana nilai 90 - 110 mendapat predikat BAIK dan capaian kinerja Stasiun PPMHKP Baubau mendapatkannya sehingga dapat disimpulkan kinerja organisasi yang sudah sangat baik sesuai target kinerja yang ditetapkan di awal tahun 2026.

Adapun capaian kinerja Triwulan IITahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Baubau Triwulan IITahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		KINERJA	REALISASI		
					TARGET TAHUNAN	TW II	%
SK.1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)		72%	75,40%	104,72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)		72%	68,32%	94,44
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode TerstandarPengendalian dan Pengawasan Mutu HasilKelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)		72%		
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dilingkungan Stasiun PPMHKPBaubau	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)		82,5	81,66	98,98
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)		77		
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)		86,2		
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Persen)		86%	100%	116,3
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau		82	99.62	121,48

		(Nilai)			
	9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	71,75		
	10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	77%	100	129,8
	11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)	89	95,52	107,3

3.3. ANALISIS DAN EVALUASI

Sasaran Strategis : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan

IK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati

perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

- Standar Nasional Indonesia (SNI)
- Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa **rekomendasi** yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Tabel 3. Capaian IK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau

Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	% Thd Target
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	72%	75,40%	104,72

Pada Triwulan I ini untuk IKU Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau terdapat target tahunan sebesar 72 % dengan capaian **75,40%** sehingga persentase capaian terhadap target adalah **106,11 %** yang didapatkan dari data yang diolah oleh Pusat Mutu Produksi Primer melalui Surat Kepala Pusat Mutu Produksi Primer Nomor B.607/BPPMHKP.3/RC.610/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 tentang Capaian Indikator Kinerja “Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan” Triwulan II Tahun 2026 atas kinerja UPT terhadap nilai rata-rata dari persentase 5 indikator antara lain Tingkat Efektifitas CBIB, Tingkat Efektifitas CPIB, Tingkat Efektifitas CDOIB-CPOIB, Tingkat Efektifitas CPPIB dan Tingkat Efektifitas CPIB

Kapal . Data Tingkat Efektifitas CBIB = 77,00%, Tingkat Efektifitas CPIB = 70,00%, Tingkat Efektifitas CDOIB-CPOIB = 70,00%, Tingkat Efektifitas CPPIB = 70,00% dan Tingkat Efektifitas CPIB Kapal = 90,00.

Secara nyata capaian Sertifikasi CPIB Kapal dan CBIB yang telah terbit pada Triwulan II lingkup Stasiun PPMHKP Baubau ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Kegiatan Sertifikat CPIB

No	Nama Kapal	Alamat	Tanggal Inspeksi	Jenis Produk	Ket
1	Huhate 01	Jl. Pahlawan, Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau	16 Maret 2026	Ikan Pelagis Segar (<i>Fresh Pelagic Fish</i>)	10 GT
2	KMN, Nelayan Bakti 20	Jl. Wawokia No. 54 Kel. Bone-bone Kec. Batupoaro Kota Baubau	21 April 2026	Ikan Pelagis Segar (<i>Fresh Pelagic Fish</i>)	10 GT
3.	KMN, Nelayan Bakti 20	Jl. Labalawo Kel Wajo Kec Murhum Kota Baubau	22 April 2026	Ikan Pelagis Segar (<i>Fresh Pelagic Fish</i>)	10 GT

Tabel 5. Capaian Kegiatan Sertifikat CBIB

No	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Kegiatan Usaha	Komoditas	Grade
1	Mulimu	Jalan Poros Baubau - Pasarwajo Desa/Kelurahan Kaisabu Baru, Kec. Sorawolio, Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos: 93711	Ikan Nila (<i>Oreochromis sp.</i>)	Cukup
2	La Imi	Jalan. Latsitarda Lingkungan safari Kec. Betoambari, Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos: 93711	Ikan Komet (<i>Cyprinus.sp.</i>)	Cukup

IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Cara Perhitungan :

$$X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SPPMHKP Baubau

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

Tabel 6. Capaian IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)

Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	% Thd Target
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	72%	68,32%	94,44

Pada Triwulan II ini untuk IKU Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau terealisasi **68,32%** dengan % capaian terhadap target sebesar **94,44%** yang didapatkan dari pengukuran Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen), Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen) dan Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen) dibagi 3 (jumlah komponen tersebut). Nilai yang ada berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Tim Pusat Mutu Pasca Panen pada kurun waktu Triwulan II Tahun 2026 melalui Surat Kepala Pusat Mutu Pascapanen Nomor B.2590/BPPMHKP.4/RC.610/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026 tentang Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen.

Sasaran Strategis : Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

IK 3. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)

Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional

- Nilai kualitas penerapan *Quality Managemen System* (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi
- ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri
- Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:
 1. Ruang Lingkup;
 2. Acuan Normatif;
 3. Persyaratan Umum;
 4. Persyaratan Struktural;
 5. Persyaratan Sumber Daya;
 6. Persyaratan Proses;

7. Persyaratan Sistem Manajemen

- ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:
 1. Persyaratan Umum
 2. Persyaratan Struktural
 3. Persyaratan Sumberdaya
 4. Persyaratan Proses
 5. Persyaratan Sistem Manajemen

Tabel 7. Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau

Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	% Thd Target
Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau	72%	0	0

Sesuai tabel di atas, untuk Triwulan I ini IKU 3 Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PPMHKP Baubau belum ada capaian yang dapat dilaporkan.

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Baubau

IK 4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN Kriteria pengukuran indeks profesionalitas ASN mencakup: - Dimensi Kualifikasi - Dimensi Kompetensi - Dimensi Kinerja - Dimensi Disiplin.

Formula Perhitungan :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$$\begin{aligned}
 W_{1j} * R_{1j} &= \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j} \\
 W_{2k} * R_{2k} &= \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k} \\
 W_{3l} * R_{3l} &= \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l} \\
 W_{4m} * R_{4m} &= \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}
 \end{aligned}$$

Tabel 8. Capaian IK 4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)

Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	% Thd Target
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	82,5	81,66	98,98

Pada Triwulan II ini belum ada capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Baubau yang dapat dilaporkan mengingat target capaian adalah per semesteran sehingga di Triwulan II dan Triwulan IV baru dapat dilaporkan capaiannya.

IK 5. Nilai Pembangunan Integritas lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP

Formula Perhitungan :

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
- d. Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
- f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal

Tabel 9. Capaian IK 5. Nilai Pembangunan Integritas lingkup UPT Stasiun PPMHKP Baubau

Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	% Thd Target
Nilai Pembangunan Integritas lingkup UPT Stasiun PPMHKP Baubau	77	0	0

Pada Triwulan II ini belum ada capaian IKU Nilai Pembangunan Integritas lingkup UPT Stasiun PPMHKP Baubau yang dapat dilaporkan mengingat target capaian adalah per tahunan sehingga di akhir tahun baru dapat dilaporkan capaiannya.

IK 6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Formula Perhitungan :

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi

SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Tabel 10. Capaian IK 6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Baubau

Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi	% Thd Target
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau	86,2	0	0

Pada Triwulan II ini belum ada capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Baubau yang dapat dilaporkan mengingat target capaian adalah per tahunan sehingga di akhir tahun baru dapat dilaporkan capaiannya.

IK 7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Baubau

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran

Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BPPMHKP berdasarkan LHP (baik bentuk LHP Audit, Relu dan Evaluasi) yang terbit pada Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPPMHKP menjadi objek pengawasan. Indikator persentase hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Keterangan :

$$\%_{kasus} = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang diberikan kepada Unit Kerja

Target Indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada Tahun 2026 adalah sebesar 86% dengan realisasi di Triwulan II sebesar 100 % berdasarkan tampilan pada aplikasi SIDAK KKP (<https://sidak.kkp.go.id/login>) yang menunjukkan capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP telah diselesaikan keseluruhannya atau 100% sehingga persentase capaian terhadap target sebesar **116,3%** dan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 11. Capaian IK 7. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau

Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	% Thd Target
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau	86%	100%	116,3

IK 8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran

Formula Perhitungan :

$$\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Tabel 12. Capaian IK 8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau

Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	% Thd Target
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	92,1	99,62	108,16

Pada Triwulan I ini belum ada capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau yang dapat dilaporkan mengingat target capaian adalah per semesteran sehingga di Triwulan II dan IV baru dapat dilaporkan capaiannya.

IK 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Formula Perhitungan :

$$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$$

Keterangan:

- NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I
- CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
- NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker
- NEsatker : Nilai Efisiensi Satker
- WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
- WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker
- WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

NKPA level 1 didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Tabel 13. Capaian IK 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau

Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	% Thd Target
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	71,75	0	0

Pada Triwulan I ini belum ada capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau yang dapat dilaporkan mengingat target capaian adalah per tahunan sehingga di akhir tahun baru dapat dilaporkan capaiannya

IK 10. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai

pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 14. Capaian IK 10. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)

Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	% Thd Target
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	77%	100%	129,8

Pada Triwulan II ini terdapat capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau adalah **100%** sehingga Persentase nya terhadap target adalah sebesar **129,8 %** yang didapatkan dari data Biro Umum PBJ KKP yaitu untuk Stasiun PPMHKP Baubau dari Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP sebesar Rp 160.800.000,- dibagi pagu anggaran Rp 160.800.000,- sehingga tercapai **100%**.

IK 11. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Stasiun PPMHKP Baubau menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses pada Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat Si Susun KKP dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/63>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Formula Perhitungan :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut : **IKM unit pelayanan x 25**

Tabel 15. Capaian IK 11. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)

Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	% Thd Target
Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)	89	95,62	107,6

Pada Triwulan I ini terdapat capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Baubau adalah 89 sehingga Persentase nya terhadap target adalah sebesar **108,6 %** yang didapatkan dari data Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat Si Susun KKP dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/63> dengan jumlah responden sebanyak 18. Ini menunjukkan bahwa hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Stasiun PPMHKP Baubau sudah **SANGAT BAIK**.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Baubau Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp. 3.981.620.000,-** (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dengan rincian Jenis Belanja sebagai berikut : **Belanja Pegawai** sebesar **Rp 3.493.361.000,-** (*Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*), **Belanja Barang** sebesar **488.259.000,-** (*Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), **Belanja Modal = 0**

Pada Triwulan II terdapat pengalihan anggaran belanja ke Rincian Output Khusus sebesar **Rp. 327.617.000,-** tahun 2026 pagu awal semula **Rp 4.350.758.000** menjadi **Rp 3.981.620.000**. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Baubau sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan Jenis Belanja yaitu untuk Belanja Pegawai terealisasi **Rp 1.369.047.831,-** atau sebesar **39,19%** dan Belanja Barang terealisasi **Rp 208.189.396,-** atau sebesar **42,64%** sedangkan untuk Belanja Modal tidak

ada pagu anggaran yang ditetapkan. Total realisasi anggaran untuk Triwulan II adalah **Rp 1.577.237.227,-** atau sebesar **39,61 %**. Pagu anggaran tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Manajemen Mutu dan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan. Adapun realisasi anggaran seluruhnya untuk satker Stasiun PPMHKP Baubau, untuk Triwulan II tahun 2026 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 16. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja untuk Stasiun PPMHKP Baubau Triwulan II Tahun 2026

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	3.493.361.000	1.369.047.831	39.19
2.	Belanja Barang	488.259.000	208.189.396	42.64
3.	Belanja Modal	0	0	0
	TOTAL	3.981.620.000	1.577.237.227	29.61

3.5. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Stasiun PPMHKP Baubau telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan penggunaan anggaran, prasarana dan sarana serta SDM yang tersedia. Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK No.22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Nilai efisiensi anggaran Stasiun PPMHKP Baubau sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan pada aplikasi SMART sesuai hasil pada <https://monev.kemenkeu.go.id/App2024/satker>

PENUTUP

Dalam melaksanakan 3 pilar misi pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan melalui pelaksanaan program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2026, Stasiun PPMHKP Baubau telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dan semua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi target pada Triwulan II 2026 ini telah memenuhi target atau telah terealisasi dengan baik.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama khususnya di Triwulan I, Stasiun PPMHKP Baubau masih menghadapi beberapa hambatan di antaranya adalah :

1. Terkait perijinan eksternal untuk pembudidaya yang menggunakan area pesisir dan laut
2. Pembinaan dari instansi terkait belum maksimal sehingga permohonan yang masuk belum dapat ditindaklanjuti proses

sertifikasinya.

3. Sarana, prasarana dan dokumen prosedur teknis untuk implementasi metode terstandar belum memadai sehingga capaiannya belum terealisasi.

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan mendatang diantaranya:

1. Setiap tim kerja dan penanggungjawab kegiatan agar lebih optimal dalam mengkoordinasikan hambatan eksternal yang ada sehingga di periode selanjutnya dapat terealisasi dengan baik.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja yang lebih baik di periode selanjutnya dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Triwulan II Stasiun PPMHKP Baubau Tahun 2026 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala Stasiun PPMHKP Baubau kepada Kepala BPPMHKP dan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

Lampiran 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 SPPMHKPM Baubau.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3510070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
 LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Arrofik**
 Jabatan : **Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ishartini**
 Jabatan : **Ptt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Juni 2026

PIHAK KEDUA

Ptt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani Secara Elektronik

Ishartini

PIHAK PERTAMA

Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau



Ditandatangani Secara Elektronik

Arrofik

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	72
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Baubau	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Zona Integritas lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	77
		6.	Nilai penilaian mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	71,75
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	77
		11.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	89

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.927.808.000
2.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	53.812.000
Total Anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau Tahun 2026		3.981.620.000

Jakarta, 17 Juni 2026

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau



Ditandatangani
Secara Elektronik

Arrofik

Lampiran 2. Rincian Target Indikator Kinerja

RINCIAN TARGET INDIKATOR KINERJA
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2020

No	SS / IKU	Target							
		Tw 1	Tw 2	Sm 1	Tw 3	sd Tw 3	Tw 4	Sm 2	Tahun
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
	a. Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Baubau (%)	72	72	72	72	72	72	72	72
	b. Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Baubau (%)	72	72	72	72	72	72	72	72
2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan								
	c. Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan	-	-	-	-	-	72	72	72
3	Tatakelola pemerintahan Pemerintah yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Baubau								
	d. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)	-	75	75	-	-	82,5	82,5	82,5
	e. Nilai Pembangunan Integritas lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	-			-	-	77	77	77
	f. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	-	-	-	-	-	86,2	86,2	86,2
	g. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	80	80	80	80	80	80	80	80
	h. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	-	83	83	-	-	82,1	82,1	82,1
	i. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	-	-	-	-	-	71,75	71,75	71,75
	j. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	-	-	-	-	-	77	77	77
	k. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)	8,5	80	80	80	80	80	80	80



Baubau, 17 Juni 2020

Kepala

Amrik, S.Pi, M.H

NIP.198203212008011020

Lampiran 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Kegiatan Stasiun PPMHKP Baubau Triwulan II Tahun 2026

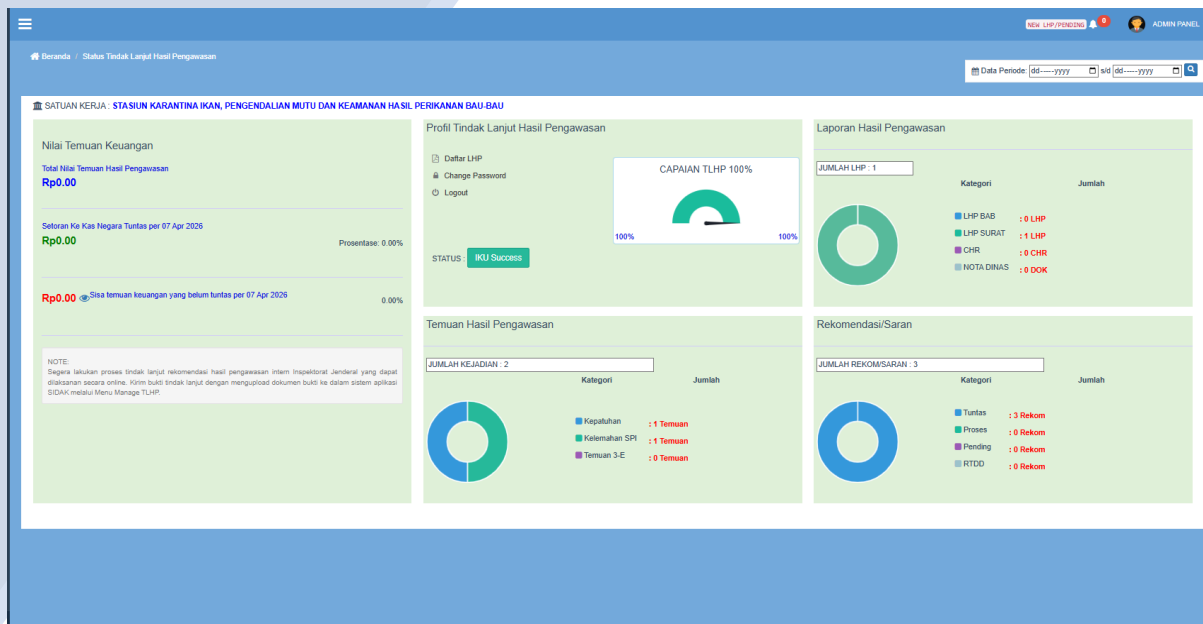


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPB

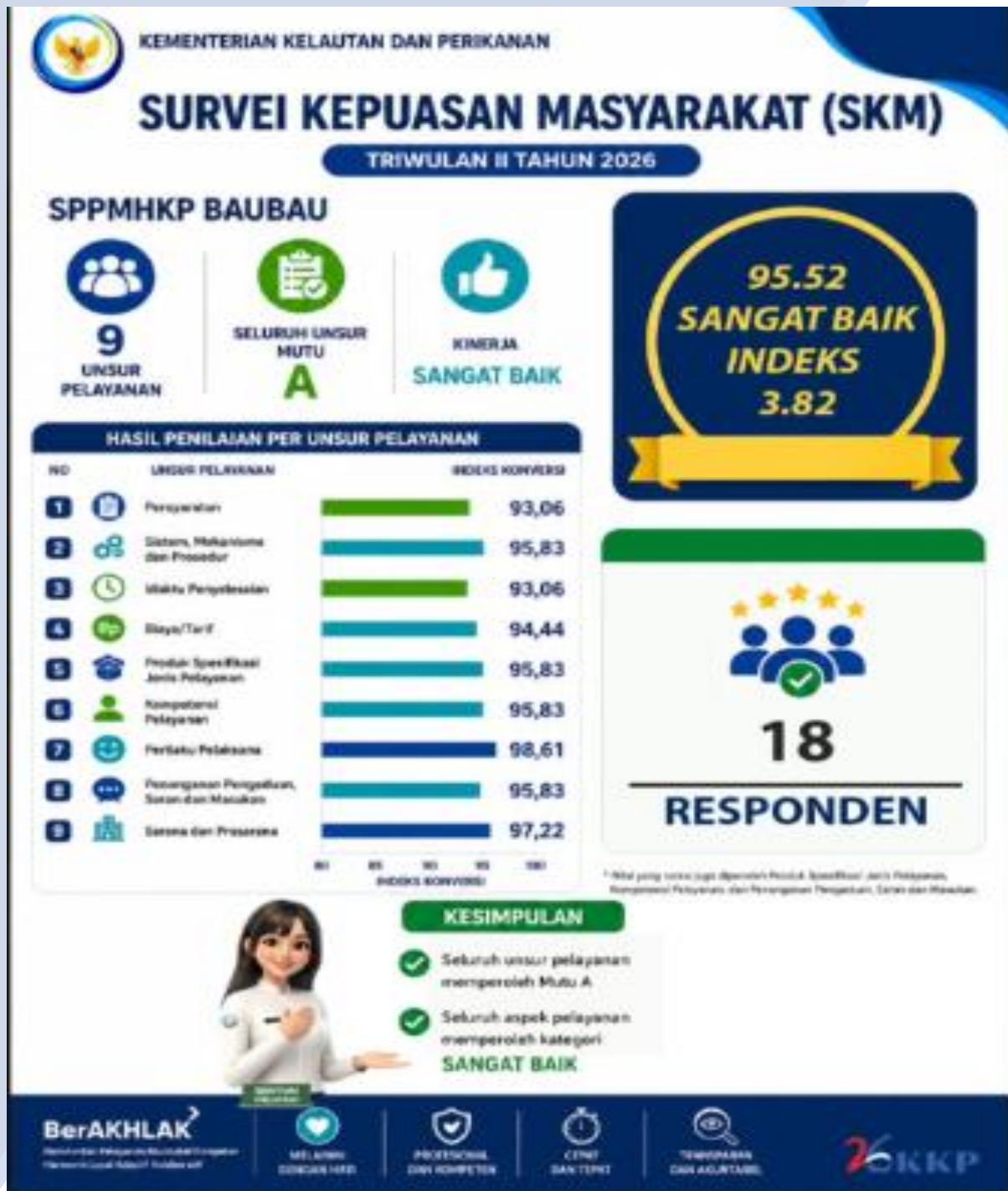
REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain Lain	Transfer	
1	849792 STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU	PAGU	3.493.361.000	488.259.000	0	0	0	0	0	0	0	3.981.620.000
		REALISASI	1.389.047.831	208.189.396	0	0	0	0	0	0	0	1.577.237.227
		%	39.19%	42.64%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	39.61%
		SISA	2.124.313.169	280.069.604	0	0	0	0	0	0	0	2.404.382.773
GRAND TOTAL		PAGU	3.493.361.000	488.259.000	0	0	0	0	0	0	3.981.620.000	
		REALISASI	1.389.047.831	208.189.396	0	0	0	0	0	0	1.577.237.227	
		%	39.19%	42.64%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	39.61%	
		SISA	2.124.313.169	280.069.604	0	0	0	0	0	0	2.404.382.773	

Lampiran 4. Tangkapan Layar Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aplikasi SIDAK KKP



Lampiran 5. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2026



Lampiran 6. Capaian Setifikasi CPIB Kapal



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Ministry of Marine Affairs and Fisheries
 Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
 GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

Nomor: ID-CPIB-K-74-260245

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
 Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menetapkan bahwa
 to certify that

Kapal/Perikanan Fishing Vessel	: KMN. Nelayan Bhakti 16
Alamat Address	: Jl. Labalawa Kel. Wajo Kec. Marhum
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	: 10 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	: 22 April 2020
Jenis Produk Commodity	: Ikan Pelagis Segar Fresh Pelagic Fish
Pemeringkatan Grade	: I

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
 is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dibagikan di : JAKARTA
 Issued in

Pada tanggal : 4 Mei 2020
 Date

Berlaku sampai : 4 Mei 2020
 Valid until

Kepala BPMP/KP
 Director General of MPQAA



Ditandatangani
Secara Elektronik

ISHARTINI



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Ministry of Marine Affairs and Fisheries
 Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
 GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

Nomor: ID-CPIB-K-74-260238

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
 Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menetapkan bahwa
 to certify that

Kapal/Perikanan Fishing Vessel	: KMN. NELAYAN BHAKTI 20
Alamat Address	: Jl. Wawotia No. 54 Kel. Bone-bone Kec. Balikpapan
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	: 10 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	: 21 April 2020
Jenis Produk Commodity	: Ikan Pelagis Segar Fresh Pelagic Fish
Pemeringkatan Grade	: I

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
 is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dibagikan di : JAKARTA
 Issued in

Pada tanggal : 30 April 2020
 Date

Berlaku sampai : 30 April 2020
 Valid until

Kepala BPMP/KP
 Director General of MPQAA



Ditandatangani
Secara Elektronik

ISHARTINI

Lampiran 7. Capaian Sertifikasi CBIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 130723001634700010001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: MUUMU
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1307230016347
Alamat Kantor	: LINGKUNGAN KASABU RANO 93711, Desa/Kelurahan Kasabu Baru, Kec. Sorawolio, Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 93221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam
Lokasi Kegiatan Usaha	: Jalan Poros Baubau - Pasarwejo Desa/Kelurahan Kasabu Baru, Kec. Sorawolio, Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Perpanjangan atas izin	:
- Nama Izin	: Sertifikat CBIB
- Nomor Izin dan Tanggal Terbit	: ID-CBIB-SG-T-000789, 22 Februari 2024

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diberikan di Jakarta, tanggal: 17 Maret 2024

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diberikan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan rekaman.



Balai Sertifikasi Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
LAMPIRAN PB-UMKU: 130723001634700010001**

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : | ID-CBIB-T-74-260032 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : | Jalan Poros Baubau - Pasarwajo |
| 3. Komoditas | : | Nila (<i>Oreochromis sp.</i>) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : | 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : | Cukup |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam CSE berdasarkan data dari Pelaku Usaha, disertai dalam sistem CSE, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi perubahan data dokumen ini akan diterbitkan sebagai dokumen revisi.
3. Dokumen ini tidak menggantikan semua dokumen yang diperlukan untuk mendukung pengalokasian dan BBK-BBM.
4. Data terbagi Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem CSE menggunakan hak akses.



Lampiran 8. Persentase Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau

Lampiran 1

Nomor : B.736/SJ.7/PL.410/VI/2026

Tanggal : 9 Juli 2026

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TERUMUMKAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2026 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode E1	Nama Unit Eselon I	I Setkor	Persentase RUP Terumumkan				Keterangan	Capaian IKUTW II - TA. 2026		
				Σ Pagu Pengadaan	Σ Pagu Terumumkan	Σ Selisih Terumumkan	% RUP Terumumkan		Target Score IKUTW II	Capaian Score IKUTW II	Keterangan
1	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	90,098,492,000	90,098,492,000	0	100.00	SESUAI	77.00	100.00	Capaian Sesuai Target Maksimal
2	08	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	40,528,993,000	40,528,993,000	0	100.00	SESUAI	75.00	100.00	Capaian Sesuai Target Maksimal
3	07	Direktorat Jenderal Pengkajian Kelautan	5	1,179,150,929,000	1,179,089,911,000	61,018,000	99.99	KURANG Terumumkan	76.00	99.99	Capaian melebihi Target
4	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	6,538,648,319,000	6,539,057,155,000	(408,836,000)	100.01	LEBIH Terumumkan	77.00	99.99	Capaian melebihi Target
5	01	Sekretariat Jenderal	3	274,871,947,000	274,960,715,000	(88,768,000)	100.03	LEBIH Terumumkan	85.00	99.97	Capaian melebihi Target
6	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	42	1,044,582,048,000	1,044,261,636,000	320,412,000	99.97	KURANG Terumumkan	77.00	99.97	Capaian melebihi Target
7	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,971,753,400,000	1,966,947,870,304	4,805,429,696	99.76	KURANG Terumumkan	77.00	99.76	Capaian melebihi Target
8	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	1,616,878,809,000	1,612,951,093,400	3,927,715,600	99.76	KURANG Terumumkan	77.00	99.76	Capaian melebihi Target
9	13	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	180,543,219,000	181,335,346,000	(792,127,000)	100.44	LEBIH Terumumkan	77.00	99.56	Capaian melebihi Target
10	02	Inspektorat Jenderal	1	13,030,248,000	13,093,680,000	(63,432,000)	100.49	LEBIH Terumumkan	77.00	99.51	Capaian melebihi Target
TOTAL			156	12,950,086,404,000	12,942,324,991,704	7,761,412,296	99.94	LEBIH Terumumkan	SKOR TPK	5.00	Persentase RUP: ≥90% - <10%



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

10

No	Kode E1 / Setkor	Nama Setkor	CETAKAN PAKET RUP			TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL				
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN								
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TANJUNG PINANG	388,074,000		388,074,000	388,074,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARAKAN	872,480,000		872,480,000	872,480,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,377,763,000		23,377,763,000	23,377,763,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
19	440807	SEKRETARIAT BADAN KIPM DAN KHP	100,174,507,000		100,174,507,000	99,351,660,000	822,847,000	100.83%	LEBIH TERUMUMKAN
20	567694	STASIUN KIPM DAN KHP KENDARI	228,306,000		228,306,000	228,306,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
21	645691	STASIUN KIPM DAN KHP MAMUJU	132,060,000		132,060,000	132,060,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
22	649711	STASIUN KIPM DAN KHP SORONG	264,756,000		264,756,000	264,756,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
23	649589	STASIUN KIPM DAN KHP ACEH	1,094,470,000		1,094,470,000	1,094,470,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
24	645693	STASIUN KIPM DAN KHP BANDUNG	753,105,000		753,105,000	753,105,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
25	427649	STASIUN KIPM DAN KHP BATAM	737,668,000		737,668,000	768,388,000	(30,720,000)	98.00%	KURANG TERUMUMKAN
26	649792	STASIUN KIPM DAN KHP BAUBAU	160,800,000		160,800,000	160,800,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
27	649633	STASIUN KIPM DAN KHP BENGKULU	574,368,000		574,368,000	574,368,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
28	649814	STASIUN KIPM DAN KHP BIMA	784,570,000		784,570,000	784,570,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
29	649732	STASIUN KIPM DAN KHP CIREBON	758,484,000		758,484,000	758,484,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
30	649678	STASIUN KIPM DAN KHP GORONTALO	493,789,000		493,789,000	493,789,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
31	649636	STASIUN KIPM DAN KHP JAMBI	195,176,000		195,176,000	195,176,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
32	649551	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000		380,500,000	380,500,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
33	649771	STASIUN KIPM DAN KHP LUWUK BANGGAI	171,170,000		171,170,000	171,170,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
34	649684	STASIUN KIPM DAN KHP MEDAN II	978,651,000		978,651,000	978,651,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
35	649688	STASIUN KIPM DAN KHP MERAK	996,270,000		996,270,000	996,270,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
36	649704	STASIUN KIPM DAN KHP MERAUKE	903,509,000		903,509,000	903,509,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
37	567432	STASIUN KIPM DAN KHP PADANG	748,892,000		748,892,000	748,892,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
38	649657	STASIUN KIPM DAN KHP PALANGKARAYA	853,490,000		853,490,000	853,490,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
39	567481	STASIUN KIPM DAN KHP PALEMBANG	390,073,000		390,073,000	390,073,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
40	649601	STASIUN KIPM DAN KHP PALU	397,648,000		397,648,000	397,648,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
41	649699	STASIUN KIPM DAN KHP PANGKAL PINANG	1,284,545,000		1,284,545,000	1,284,545,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
42	567453	STASIUN KIPM DAN KHP PEKANBARU	754,512,000		754,512,000	754,512,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
43	567538	STASIUN KIPM DAN KHP PONTIANAK	833,020,000		833,020,000	833,020,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%